BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian *Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua

Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti:

- IPTN
- PJKA
- ITB
- Dan pihak swasta lainnya

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)* dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)*tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu *Unit Pelaksana Daerah yang struktural.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan *Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah* disingkat *BAPESITELDA* sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. *Telematika* singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan *Perda Nomor 21 Tahun 2008* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi* Jawa Barat disingkat *DISKOMINFO,* yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas.Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.1.1 Visi dan Misi

a) Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien.

b) Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

1) Meningkatkan sarana dan prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika;

2) Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
3) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
4) Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5) Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

1.1.2 Logo dan Arti Lambang

Gambar 1.1

Logo Provinsi Jawa Barat



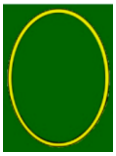
Sumber: http://diskominfo.jabarprov.go.id, 2012

Secara keseluruhan merupakan sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat.kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu kujang.

Berikut ini makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo tersebut:



Gemah Ripah Repeh Rapih, merupakan pepatah lama Sunda yang bermaksud menyatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang kaya raya yang didiami oleh banyak penduduk yang rukun dan damai;



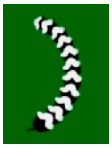
Berbentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berassal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh para lascar kerajaan zaman dahulu;



Kujang merupakan alat serba guna yang dikenal pada hampir setiap rumah tangga sunda dan apabila perlu dapat juga digunakan sebagai alat penjaga diri dan lima lubang pada kujag tersebut melambangkan lima sila pada dasar negara Pancasila;



Padi merupakan bahan makanan poko masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan hari tanggal 17 dari bulan Proklamasi;



Kapas melambangkan sandang dan jumlah kapas 8 buah menyatakan bulan ke-8 dati tahun Proklamasi;



Gunung adalah lambang yang menunjukan bagian terbesar dari Jawa Barat berupa daerah pegunungan;



Sungai dan terusan melambangkan sungai,terusan dan saluran air yang banyak terdapat di Jawa Barat; Sawah dan perkebunan ; menyatakan luasnya lahan persawahan da perkebunan (dibagian

selatan dan tengah) di Jawa Barat;



Dam, saluran air dan bendungan kegiatan dibidang irigasi merupakkan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris.

Pada lambang Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus.

- Hijau, artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
- Kuning, artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian.
- Biru, artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian.
- Merah, artinya melambangkan keberanian.
- Putih, artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.2 Sejarah Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE)

Diawali dari perubahan Struktur Organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang kewenangan Pusat dan Daerah. Dimana diatur dengan Dinas dan Badan apa saja yang harus ada di pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten. Berdasarkan hasil bahasan di tingkat Dewan Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan perlunya DISKOMINFO untuk mengakomodir tugas dan fungsi komunikasi dan informatika dari Pemerintah Pusat. Hasil bahasan di tingkat DPRD menghasilkan Peraturan

Daerah tentang sotk Dinas dan Lambang sebagai lembaga teknis di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan DISKOMINFO termasuk dalam lembaga teknis yang tertuang dalam Perda tersebut.

Berdasarkan Perda tersebut DISKOMINFO memiliki struktur organisasi yang meliputi Bidang Umum, Bidang Telematika, Bidang SKDI, Bidang Pengolahan data Elektronik (PDE), dan Bidang POSTEL.

Sejak ditetapkan Perda tersebut, Bidang PDE menjadi salah satu Bidang baru di tungkat Provinsi Jawa Barat yang menangani pengelolaan data yang berbasis Informatika atai Komputerisasi.Bidang PDE memiliki Struktur, Sub Bagian Bidang Penyajian Data, Seksi Integrasi Data, dan Seksi Kompilasi Data.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Berikut ini struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
    b. Subbagian Keuangan;
    c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
    a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

   a. Seksi Komunikasi Sosial ;

   b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;

   c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan;

   a. Seksi Pengembangan Telematika;

   b. Seksi Penerapan telematika;

   c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

   a. Seksi Kompilasi Data ;

   b. Seksi Integrasi Data ;

   c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE

   a. Tata Usaha LPSE

   b. Layanan Informasi LPSE

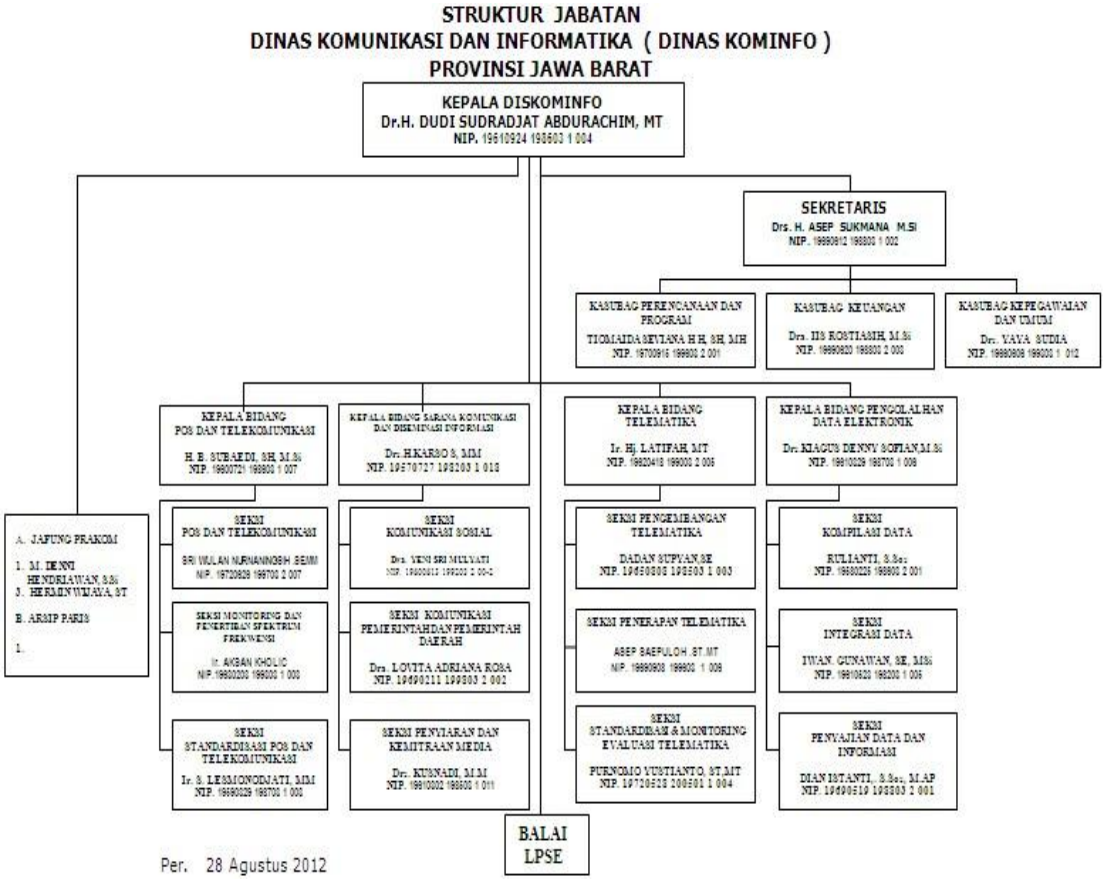
   c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

Dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terbentuknya bagan struktur organisasi yang masing-masing memiliki jabatan atau kedudukan yang telah di tentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat itu

sendiri, berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2012

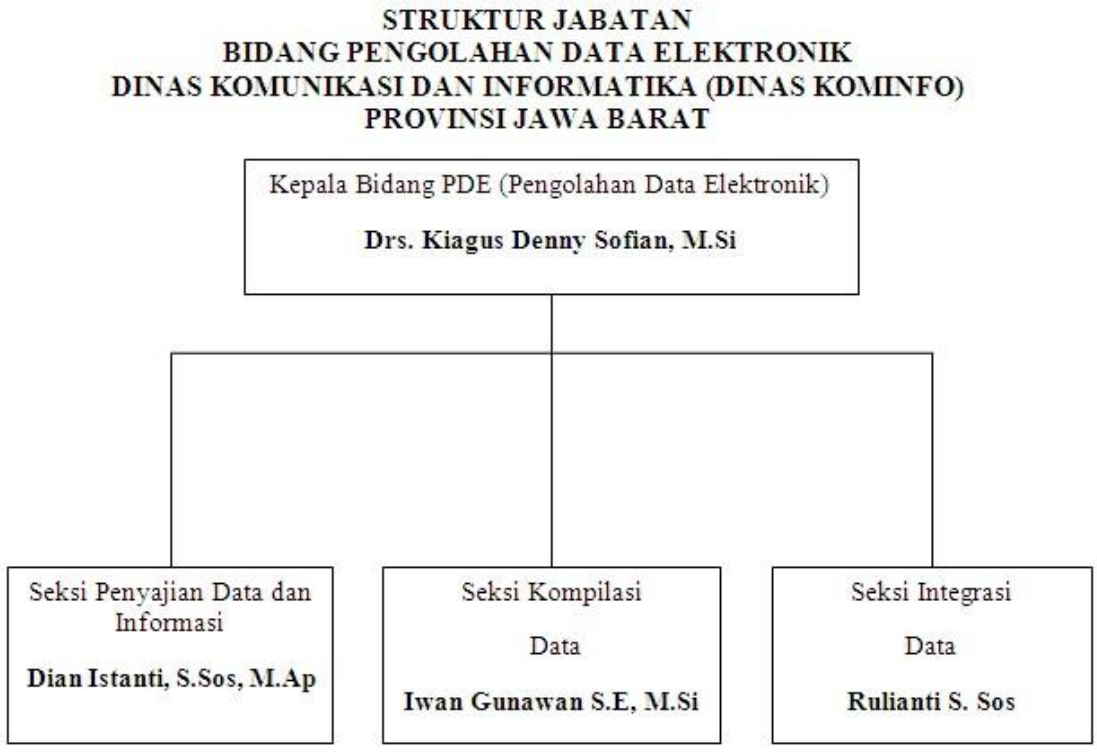
1.4 Struktur Organisasi Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat membawahi beberapa bidang, salah satunya adalah Bidang Pengolahan Data Elektronik atau PDE yang terdiri dari beberapa seksi-seksi, berikut ini adalah struktur organisasi Bidang Pengolahan Data Elektronik atau PDE di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Bidang Pengolahan Data Elektronik

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2012

1.5 *Job Descriptions*

Bidang Pengolahan Data Elektronik memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan data elektronik.

Rincian tugas Bidang Pengolahan Data Elektronik :

- menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pengolahan Data Elektronik.
- menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik.
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kompilasi data.
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi integrasi data.
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyajian data dan informasi.
- menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik.
- menyelenggarakan koordinasi bahan penyelenggaraan bidang pengolahan data elektronik.
- menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/ Kota.
- menyelenggrakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengolahan data elektronik.
- menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi :

1. Seksi Kompilasi Data

   Seksi Kompilasi Data memiliki tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas kompilasi data.

   Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data.
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data.
- melaksanakan pengolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi.melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik.
- melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik.
- melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah.
- melaksanakan fasilitasi kompilasi data.
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Integrasi Data

   Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data.

Rincian Tugas Seksi Integrasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data.
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data.
- melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas *e-Government* skala provinsi.
- melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi.
- melaksanakan menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi.
- melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website.
- melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis.
- melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server.
- melaksanakan pengolahan nama Sub Domain *go.id*.
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi integrasi data.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Penyajian data dan Informasi

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.

Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi.
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data.
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi.
- melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik.
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk.*
- melaksanakan pengelolaan website *www.jabarprov.go.id.*
- melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi.
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyajian data.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi atau institusi berfungsi sebagai alat penunjang maksud dan tujuan dari organisasi atau institusi itu sendiri. Begitu

pula di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat penunjang proses upaya dalam pelayanan publik.

1.6.1 Sarana

Sarana merupakan alat penunjang dalam organisasi atau institusi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi jawa Barat memiliki sarana-sarana yang akan dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Sarana	Jumlah Unit
1	Komputer	96
2	Printer	25
3	Kamera Video dan Kamera Foto	21
4	Server	20
5	UPS	22
6	Router	13
7	Switch	18
8	Scanner	28
9	Alat Studio	4
10	Unit Jaringan (Gardu Induk dan Jaringan Telepon	2

Sumber: Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2012

1.6.2 Prasarana

Prasarana adalah hal yang paling pertama yang harus kita pikirkan dalam membangun sebuah organisasi.Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki gedung yang terletak di Jalan Taman Sari No.55, Bandung.

Tabel 1.2

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Prasarana	Jumlah
1	Ruang Kepala Dinas	1
2	Ruang Kepala Seksi	1
3	Ruang Sekertariat Kepala Dinas	1
4	Ruang Seksi Penyajian Data dan Informasi	1
5	Ruang Seksi Kompilasi Data	1
6	Ruang Seksi Integrasi Data	1
7	Ruang Website	1

Sumber: Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2012

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Lokasi praktek kerja lapangan merupakan lokasi dimana tempat melakukan praktek kerja lapangan.Dan waktu praktek kerja lapangan merupakan jangka waktu melakukan praktek kerja lapangan.

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat

- Alamat : Jalan Taman Sari No. 55 Bandung 40132.
- Telepon : (022) 2502898
- Fax : (022) 2511505
- Email : info@jabarprov.go.id

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2012 s/d 06September 2012, dengan waktu 3 hari kerja yaitu hari Senin, Selasa, dan Kamis, dimana jam kerja yang ditentukan oleh Bapak Pembimbing PKL.